

"Bagi Hasil" dalam Bank Islam: Beban (Biaya) atau Bukan ?

Oleh : M. Akhyar Adnan

....cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka (Al Qur'an 11 : 85)

If there is a single verb that describes the accounting function, that verb is measure (John Derden)

Kehadiran Bank Islam di bumi Indonesia masih sangat baru. Bank Muamalat Indonesia (BMI), misalnya, baru berdiri pada 1 Nopember 1991, dan resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 (BMI, 1993, h.18-19). Selain BMI, sampai saat ini belum ada Bank Islam lainnya yang beroperasi di Indonesia, kecuali 29 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang bertebaran di berbagai tempat (Adnan, 1994). Kondisi ini, mau tidak mau menempatkan BMI sebagai *leader* dalam industri Bank Islam di Indonesia.

Keberadaan Bank-bank Islam yang relatif baru, tentu cukup menarik untuk dikaji. Sekian banyak kajian dan penelitian yang menyangkut Bank Islam dari berbagai aspek saat ini sedang berlangsung. Untuk masa-masa yang akan datang, penulis yakin jumlah kajian dan penelitian akan makin bertambah.

Salah satu yang menarik untuk dikaji

dari bank Islam, tentu saja adalah aspek akuntansi. Karena akuntansi merupakan salah satu sarana utama kalau tidak satu-satunya yang lazim dipakai sebagai jembatan untuk menilai salah satu unsur yang sangat mendasari ekonomi Islam, yakni keadilan. Dan sudah menjadi kesepakatan umum bahwa laporan akuntansi atau laporan keuangan merupakan media utama bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk menjaga kepentingan masing-masing dengan sebuah lembaga atau perusahaan.

Tulisan ini dimaksudkan untuk mencoba menelaah sebagian kecil aspek akuntansi keuangan (*financial accounting*) dalam praktek BMI.¹⁾ Sorotan terutama diarahkan kepada sebuah terminologi (dan akibatnya klasifikasi rekening) yang dipakai oleh BMI dalam Laporan Keuangan. Hal ini menarik dikaji terutama karena belum ada acuan baku yang teruji. Kalaupun acuan-acuan yang ada seperti PAI khususnya SKAPI dianggap sebagai acuan baku, maka ini pun mengandung beberapa kelemahan yang perlu segera diperbaiki. Paling tidak; seperti diakui sendiri oleh IAI, SKAPI belum memperhitungkan sama sekali keunikan operasi bank Islam, sehingga bank-bank yang beroperasi dengan pola bagi hasil, diberi keleluasaan untuk

Drs. M. Akhyar Adnan, MBA adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta

menyesuaikan praktek akuntansinya dengan keadaan bank tersebut (IAI, 1994, h.272).

Secara khusus tulisan ini akan mencoba mengkaji pemakaian terminologi "Beban Bagi Hasil" yang digunakan oleh BMI. Kajian ini penulis anggap perlu karena antara lain posisi BMI sebagai *imam* bagi BPRS-BPRS. Penulis yakin dengan asumsi bahwa BMI adalah *leader* dalam industri ini dan sudah ditangani oleh orang-orang yang sesuai dengan keahliannya - BPRS yang ada akan mengikut saja praktek yang ada. Sehingga sesuatu yang mungkin tidak tepat dilakukan oleh BMI, akan diikuti pula secara buta oleh BPRS-BPRS.

Bagi Hasil dan Beban

Seperti sudah umum diketahui, bahwa Bank Islam atau bank yang beroperasi dengan pola bagi hasil, sama sekali tidak menggunakan instrumen bunga, karena bunga adalah riba, dan riba itu haram. Sebagai alternatif (yang diyakini dapat diterima oleh syariah) Bank Islam menggunakan pola bagi hasil. Ini berlaku, baik dalam hal penggalangan dana dari nasabah, maupun untuk pembiayaannya.

Dalam Laporan Tahunan BMI, baik tahun buku 1992 maupun tahun buku 1993, "hasil" yang dibagikan kepada deposan tersebut diperlakukan sebagai "beban". Dengan kata lain, BMI menganggapnya sebagai beban bagi Bank. Tampaknya, sampai saat ini tidak pernah ada keberatan atas perlakuan semacam itu, baik dari pihak nasabah, Bank Indonesia, pemegang saham atau siapapun yang punya kepentingan dengan BMI. Termasuk yang tidak mempersoalkan ini - atau paling sedikit mendiampikannya - adalah pihak *external*

auditor yang kebetulan sudah memeriksa pembukuan BMI dan memberikan opini wajar tanpa syarat (*unqualified opinion*) dua tahun berturut-turut.

Kalau kita mau sedikit berpikir tentang pengertian dasar "*beban*" atau "*biaya*", mestinya kita perlu bertanya: apakah benar "bagi hasil" tersebut dapat dikategorikan sebagai "*beban*" atau pun "*biaya*" bagi bank? Betulkah pengertian beban atau biaya yang selama ini dimaksudkan, baik dalam buku-buku teks teori akuntansi maupun dalam standar akuntansi, termasuk PAI ataupun SKAPI, cocok dengan perlakuan yang dipakai oleh BMI?

Untuk menelaahnya, pertama, mari kita lihat pengertian "*beban*" itu sendiri. Terminologi "*beban*" muncul dalam PAI 1984. Pemakaian istilah *beban*, tampaknya sengaja dibuat untuk membedakannya dengan *biaya*. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, orang mungkin lebih terbiasa memakai istilah *biaya* dibandingkan *beban*. Tetapi dalam teknis akuntansi, adakalanya perlu pembedaan kedua istilah ini untuk maksud-maksud tertentu. Dalam *Daftar Istilah* pada PAI (1994, hal.53) tersirat jelas kesengajaan membedakan *beban* dan *biaya*. "*Beban*" menurut daftar istilah tersebut adalah sinonim dari *expense* dalam bahasa Inggris, sedangkan "*biaya*" adalah terjemahan dari *cost*.

Selanjutnya, mari kita lihat rujukan-rujukan baku berikut. Menurut Dictionary of Accountants (Kohler, 1975, p.201), *Expense* adalah :

(1) *Expired cost: any item or class of cost (or loss from) carrying on an activity; a present or past expenditure defraying a*

present operating cost expense or representing irrecoverable cost or loss; capital expenditure written down or off: a term often used with some qualifying word or expression denoting function, organization, or time; as, a selling expense, factory expense, or monthly expense.

(2) A class term for expenditure recognized as operating cost of a current or past period.

(3) Hence, any expenditure the benefits from which do not extend beyond the present.

Definisi di atas jelas menunjukkan bahwa *expense* adalah salah satu dari *cost*. Selain itu *expense* juga menyiratkan masalah waktu. *Expense* adalah biaya atau pengeluaran yang diakui untuk periode berjalan atau periode yang telah lalu. *Expense* biasanya juga dihubungkan dengan penyebutan fungsi seperti beban administrasi (*administrative expense*); organisasi seperti beban Riset dan Pengembangan (*R & D expense*) dan atau waktu seperti beban bulanan (*monthly expense*).

Perhatikan pula definisi *expenses* yang diberikan oleh FASB dalam Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 5:

Expenses (and losses) are generally recognized when an entity's economic benefits are used up in delivering or production goods, rendering services, or other activities that constitute its ongoing major central operations or when previously recognized asset are expected to provide reduced or no further benefit (par 85).

Jadi *expense* atau beban akan diakui timbulnya, manakala ada potensi-potensi ekonomis organisasi atau entity yang dipakai dalam rangka penciptaan produk

atau penyerahan atau pemberian (jasa ke pihak lain), atau setiap aktivitas lainnya yang merupakan usaha utama, atau ketika asset berkurang atau tidak lagi memberikan manfaat. Dengan kata lain, ada tuntutan bahwa ada asset yang berkurang karena dipakai.

Karena *expense* adalah bagian dari *cost*, maka ada baiknya kita lihat konsep *cost*. Menurut Paton dan Littleton (1940, p.24), *cost* adalah :

...is the amount of bargained-price of goods or services received or of securities issued in transactions between independent parties.

Lebih jauh Paton and Littleton (Ibid) juga mengatakan bahwa:

In business operations cost is largely incurred before revenue appears since the activities measured by cost are for the most part entered into for the specific purpose of subsequently generating revenue (cetak telah oleh penulis).

Satu hal juga jelas dari apa yang dikatakan oleh Paton dan Littleton bahwa pada dasarnya *cost* terjadi sebelum *revenue* muncul. Ini sejalan dengan definisi versi Kohler di atas. Bandingkan pula misalnya dengan pendapat Hendriksen dan Breda (1992, p.375) yang mengatakan bahwa *expense* terjadi pada saat barang atau jasa dikonsumsi dalam proses mendapatkan *revenue*.

Selanjutnya mari kita lihat pengertian *cost* menurut Kohler (1975, p.139):

Cost: An expenditure or outlay of cash, other property, capital stock, or services, or the incurring of a liability therefor, identified with goods or services acquired or with

any loss incurred, and measured by the amount of cash paid or payable or the market value of other property, capital stock or services given in exchange or, in other situations, any commonly accepted basis of valuation.

Sementara *expenditure* sendiri didefinisikan Kohler (p.20) sebagai berikut :

(1) *The incurring of liability, the payment of cash, or the transfer of property for the purpose of acquiring an asset or service or settling a loss.*

(2) *The amount of cash or property paid or to be paid for a service rendered, or an asset purchased.*

(3) *Any cost the benefits or which may extend beyond the current accounting period.*

Untuk bahan perbandingan, lihat pengertian *cost* yang dianggap sinonim dengan *expense* (Hammer, et al, 1994, p.20), oleh Sprouse dan Moonitz (1962, p.49):

...the decrease in net asset as a result of the use of economic services in the creation of revenues or of the imposition of taxes by governmental units. Expense is measured by the amount of the decrease in assets or the increase in liabilities related to the production and delivery of goods and the rendering of services

Atau versi Hendriksen dan Breda (1992, p.373):

....cost is measured by the current value of economic resources given up or to be given up in obtaining the goods and services to be used in operations this the value of exchange.

Kutipan-kutipan di atas rasanya sudah jelas menerangkan pengertian *expense*, *cost* ataupun *expenditure*. Namun

rasanya tidak lengkap kalau tidak melihat juga apa yang dikatakan 'buku suci' para akuntan Indonesia: *Prinsip Akuntansi Indonesia*. Pada Ps.3, ayat 3.1. (IAI, 1994, h.21) PAI menyatakan:

Istilah beban dapat dinyatakan sebagai biaya yang secara langsung atau tidak langsung telah dimanfaatkan dalam usaha menghasilkan pendapatan dalam suatu periode, atau yang sudah tidak memberikan manfaat ekonomis untuk kegiatan masa berikutnya. Yang dimaksudkan dengan biaya adalah pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa (Cetak tebal oleh penulis).

Kalau diperlukan, masih bisa ditambahkan berbagai pendapat ahli atau acuan buku lainnya tentang *expense* ataupun *cost*. Tetapi kutipan-kutipan di atas rasanya sudah cukup *representative* untuk memberikan gambaran tentang bagaimana sebetulnya pengertian beban (*expense*) dan biaya (*cost*). Dari berbagai penjelasan di atas, setidaknya ada dua ciri pokok beban atau biaya. *Pertama*, beban atau biaya merupakan pengorbanan ekonomis yang bersifat mengurangi asset atau menambah nilai kewajiban sebuah *entity*. Contohnya: beban/biaya gaji karyawan, beban/biaya pemasaran, beban/biaya administrasi, dan seterusnya. Lalu ciri *kedua* adalah, saat terjadinya. Seperti disebutkan oleh Paton dan Littleton (h.24) dan juga Hendriksen dan Breda (h.375), beban atau biaya terjadi umumnya sebelum *revenue* didapatkan.

Dengan demikian, ada satu hal yang harus disadari, bahwa tidak semua pengeluaran termasuk uang tunai/kas merupakan beban atau biaya. Pengeluaran tertentu diakui sebagai beban atau biaya, kalau pengeluaran tersebut memenuhi

kriteria beban atau biaya. Salah satu contoh adalah pembagian deviden, ini jelas bukan biaya, kendati perusahaan jelas-jelas mengeluarkan uang tunai.

Atas dasar penjelasan di atas, maka proses klasifikasi beban atau biaya, ada kalanya sedikit membingungkan, itulah sebabnya Hendriksen dan Breda (1992, h.369-371), misalnya, mewanti-wantikan betul bahwa seseorang perlu berhati-hati dalam mencatat terjadi beban dan biaya ini. Sekedar contoh mengutip penjelasan Hendriksen dan Breda (h.370), 'biaya-biaya' yang timbul dalam penjualan saham, tidak dapat dikategorikan sebagai beban.

Sekarang, untuk menilai apakah sebetulnya tepat 'bagi hasil' diklasifikasikan sebagai beban, seperti yang selama dilakukan oleh BMI, mari kita lihat hakekat pola bagi hasil itu sendiri.

Hakikat Bagi Hasil

Pola bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Islam, pada dasarnya dapat diringkaskan sebagai berikut. Misalnya seorang nasabah, sebut saja Fulan, datang membuat kontrak Mudharabah dengan bank (Islam). Dalam hal ini Fulan disebut sebagai Pemilik Modal (*Sohibul Maal*) dan Bank adalah *Sohibul 'Amal* atau *Mudharib*. Berdasarkan kontrak mudharabah ini bank dipercaya oleh Fulan untuk memutarakan dananya. Setelah waktu tertentu sesuai dengan perjanjian, mestinya diadakan evaluasi proses amanah ini. Kalau Mudharib berhasil mendapatkan laba, maka laba akan dibagi sesuai dengan perjanjian, sedangkan bila terjadi kerugian (yang wajar, bukan oleh kelalaian dan atau kecurangan Mudharib) maka semua kerugian akan menjadi tanggungjawab *Sohibul Maal*.

(Sabiq, h.34-41; Mansor, 1992, h.58-59).

Terlihat jelas disini bahwa mudharib (dalam hal ini BMI), *pertama*: sama sekali tidak perlu mengeluarkan biaya dari *asset* entity-nya. Dengan kata lain, sama sekali tidak ada proses pengurangan *asset* yang sudah dimiliki sebelum kontrak ditandatangani. Walaupun pada akhirnya ada bagian laba yang harus diserahkan kepada *sohibul maal*, maka itu BUKAN berasal dari *asset* mudharib, melainkan memang merupakan HAK pihak *sohibul maal*.

Kedua, penyerahan bagi hasil selalu terjadi setelah *revenue* atau bahkan laba sudah diterima dalam bentuk *cash* oleh Mudharib (BMI menggunakan prinsip *cash basis* dalam *Income Recognition* (1991, h.70)). Ini kalau dikembalikan kepada apa yang dikatakan oleh Paton, Littleton, Hendriksen dan Breda di atas, maka sekali lagi terlihat tidak terpenuhinya kriteria beban ataupun biaya. Karena beban atau biaya umumnya terjadi sebelum atau setidaknya bersamaan dengan didapatnya *revenue*. Berdasarkan uraian ini, maka jelas perlakuan 'bagi hasil' sebagai 'beban' ataupun 'biaya' tidak dapat diterima.

Praktik Yang Ada

Kalau kita lihat laporan Keuangan BMI baik tahun buku 1992 maupun 1993, maka yang terjadi adalah: Pada tahun buku 1992, 'bagi hasil' disebut sebagai '*beban bagi hasil*' dan diklasifikasikan sebagai beban operasional. Pada tahun buku 1993, istilah yang dipakai tidak mengalami perubahan, namun klasifikasinya yang berbeda. Pada tahun 1993, ada kesan untuk mengeluarkan 'beban' tersebut dari kelompok beban operasional, me'naik'kannya sebagai 'cost'

pengurang revenue. Kalau dianalogkan dengan jenis perusahaan dagang, 'beban bagi hasil' tersebut dianggap seperti *Cost of Good Sold*, atau kalau dibandingkan dengan bank konvensional, klasifikasinya disejajarkan dengan 'beban bunga', sehingga selisihnya dengan Pendapatan Marjin dan Bagi Hasil merupakan Bagi Hasil Netto.

Dari Laporan Keuangan BMI, baik untuk tahun 1992 maupun 1993, sama sekali tidak ada *disclosure* apa sebabnya Bank menyebut bagi hasil sebagai beban dan mengklasifikasikannya seperti diuraikan di atas. Ada beberapa kemungkinan: (1) mungkin pihak penyusun laporan keuangan terpengaruh oleh 'kemiripan' bentuk *bagi hasil* dan *biaya bunga* dalam artian *cost of fund* dalam bank konvensional, sehingga penyusun mengambil saja model laporan bank konvensional seperti yang dicontohkan dalam SKAPI, (2) penyusun kurang menyadari hakikat perbedaan beban/biaya dan bagi hasil, (3) sejauh ini tidak ada petunjuk resmi yang baku. SKAPI sendiri memberikan kebebasan kepada bank-bank yang beroperasi dengan pola bagi hasil untuk menyesuaikan proses akuntansi dengan keadaan masing-masing bank.

Kalau kita kembali ke pertanyaan dasar, bahwa apakah 'bagi hasil' dikategorikan sebagai beban atau pun biaya, maka apa yang dipraktekkan oleh BMI, baik untuk tahun buku 1992 maupun 1993, tentulah tidak dapat diterima. Karena bagi hasil BUKAN beban atau biaya bagi BMI. Penempatan bagi hasil sebagai beban operasional seperti yang dipraktekkan pada tahun buku 1992 jelas amat menyalahi pengertian *beban* atau *biaya*, tetapi merubah klasifikasinya pada tahun buku 1993 (dengan istilah yang tetap sebagai 'beban')

tidak membuat laporan menjadi lebih baik (sesuai dengan aturan yang lazim diterima).

Pengklasifikasian 'bagi hasil' sebagai beban, membuat peran akuntansi sebagai alat timbang yang adil menjadi menyimpang. Kenapa? Karena adil adalah: *Wad'u syai'in fi mahallih...*, atau *menempatkan sesuatu pada tempatnya*. Kalau BUKAN 'beban' diperlakukan sebagai BEBAN, bukanlah ini peningkatan atas sikap adil. Padahal, dalam Al-Qur'an, setidaknya lima kali Allah memerintahkan agar seseorang menimbang dengan adil (periksa Al-Qur'an: 6:152; 7:85, 11:85, 17:35, 26:181-183). Salah satu diantara ayat disebut dimuka (Q.S.11:85), sudah dikutipkan pada awal tulisan ini.

Arti Pentingnya

Seseorang mungkin akan bertanya, bukankah hal di atas hanyalah masalah klasifikasi belaka, toh nilai akhir perhitungan (laba rugi) tidak mengalami perubahan? Dengan kata lain: Seberapa pentingkah arti kesalahan klasifikasi dalam penyajian laporan keuangan?

Pertanyaan di atas dapat diduga (akan) berasal dari orang yang tidak punya latar belakang akuntansi. Setidaknya yang bersangkutan tidak mengerti beberapa konsep dasar (filosofi) yang melandasi cara penyajian laporan keuangan. Seseorang mestinya menyadari, bahwa laporan keuangan sebuah perusahaan disusun menurut sistem akuntansi adalah sebuah informasi yang mempunyai nilai tinggi. Karena berdasarkan informasi itulah banyak keputusan ekonomi yang penting bisa didasarkan. Baik investor, pemegang saham, kreditur, dan siapa saja yang punya kepentingan.

Bagaimana sebuah laporan keuangan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai landasan pengambilan keputusan? Ada banyak cara atau bentuk analisa. Tetapi yang paling umum adalah dengan analisa ratio. Analisa ratio ini cukup banyak tergantung atau dipengaruhi oleh bagaimana klasifikasi dalam sebuah laporan disusun. Oleh karena itu, kesalahan dalam klasifikasi, akan menyebabkan kesalahan dalam perhitungan ratio, kesalahan dalam perhitungan ratio, berarti kesalahan menyediakan informasi yang benar. Seseorang yang membuat keputusan dengan dasar informasi yang salah, sudah dapat diduga akan membuat keputusan yang salah.

Sekedar ilustrasi, dapat digambarkan bila seorang ingin menghitung *Operating Ratio* BMI. Formula *Operating Ratio* adalah *Operating Expenses* dibagi dengan *Operating Revenues* (Gibson, 1992, h.630). Nilai *operating expenses* yang disajikan BMI dengan mengklasifikasikan bagi hasil sebagai 'beban' akan berbeda sebesar nilai bagi hasil tersebut, dibandingkan dengan kalau bagi hasil tidak diklasifikasikan sebagai beban. Oleh karena itu, dengan asumsi bahwa nilai *Operating Revenues* tetap, maka nilai *Operating Ratio* akan berbeda, atau dalam kasus ini akan menjadi lebih kecil, karena nilai *operating expenses* dinyatakan lebih besar dengan pola penyajian yang ada. Potensi kesalahan semacam ini, tentu juga bisa terjadi untuk perhitungan ratio-ratio lainnya.

Bagaimana Seharusnya?

Pertanyaan ini relatif mudah dijawab, karena uraian di atas sudah implisit memberikan jawaban, sebenarnya. Yang jelas, 'bagi hasil' tidak boleh dianggap

atau diakui sebagai beban atau biaya oleh bank, karena selain tidak memenuhi kriteria beban atau biaya dalam pengertian umum yang lazim diterima, pengakuan bagi hasil sebagai beban atau biaya sudah barang tentu menyesatkan. Ini mestinya tidak boleh terjadi.

Apa yang dilakukan oleh Bank Islam lainnya seperti Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), menurut hemat penulis dapat dicontoh. Di BIMB, bagi hasil tersebut diistilahkan sebagai "Income attributable to depositors" (BIMB, 1993, h.59), atau dalam bahasa Melayu: "Pendapatan yang diagihkan kepada pendeposit-pendeposit" (h.31), dalam bahasa Indonesia, bisa saja diistilahkan menjadi: "Pendapatan yang Merupakan Hak Penabung", misalnya. Klasifikasinya, seperti halnya juga di BIMB, merupakan pengurang dari total pendapatan yang diterima dari Investasi yang berasal dari dana depositor.

Praktek semacam ini, selain lebih dapat diterima secara logika dan rasa keadilan, juga dapat diterima oleh International Accounting Standards (IAS). BIMB selama ini berpatokan kepada IAS, selain Malaysian Accounting Standards (MAS)² (Hamat dan Ahmad, 1991, h.245). Sejauh ini, pola penyajian yang dipakai BIMB dapat diterima, baik oleh pihak *external auditor*, maupun *stakeholders*, atau pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu, mengikuti contoh ini, cukup punya dasar yang kuat, dibandingkan dengan praktek yang saat ini berjalan.

Dilihat dari sudut SKAPI, tidak ada masalah sama sekali. Karena SKAPI ternyata memberi keleluasaan kepada bank yang beroperasi dengan pola bagi hasil untuk menyesuaikan keadaan operasinya

dengan praktik akuntansi. Sebaliknya, dengan menganggap bagi hasil sebagai beban, paling tidak BMI tidak memenuhi kriteria beban atau biaya yang digariskan oleh PAI seperti dikutipkan di muka.

Catatan Penutup

'Ilmu Akuntansi' kalau boleh disebut demikian - dilihat dari segi metodologinya, termasuk ilmu yang relatif unik dan kompleks. Dia dikembangkan dari praktek yang ada dalam industri yang dihimpun untuk selanjutnya diproses sehingga dapat diterima oleh berbagai pihak. Prinsip Akuntansi di USA, misalnya disebut dengan: GAPP (General Accepted Accounting Principles, atau Prinsip-prinsip Akuntansi yang Diterima Umum). Pengembangannya lebih kepada metode deduktif, ketimbang induktif. Oleh karena itu, tidak bisa tidak, dia sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti budaya, ekonomi politik dan ideologi. Selain itu, sampai sekarang masih saja ada yang memperdebatkan, apakah akuntansi itu ilmu, seni atau teknologi.

Oleh karena itu, apa yang terjadi pada BMI bukanlah sesuatu yang tidak biasa. Kritikan terhadap sesuatu praktek akuntansi dalam sebuah industri selalu terjadi. Di lain pihak, hal seperti ini, membuktikan pula bahwa amanat yang diemban oleh akuntansi bukanlah sesuatu yang *trivial*. Akuntansi merupakan alat ukur untuk tegaknya keadilan. Oleh sebab itu, adalah salah anggapan akuntansi hanyalah sekedar proses *pencatatan, jurnal atau posting yang sifatnya teknis belaka*. Dibalik kegiatan yang bersifat teknis tersebut, ada sebuah amanat besar, misi mulia yang diembannya, yakni bagaimana keadilan

ditegakkan.

Sebagaimana difirmankan Allah dalam Qur'an surat 17:36, bahwa pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawabannya, maka ini berlaku bagi mereka yang terlibat dalam proses akuntansi. Kesalahan dalam proses akuntansi, berarti akan menyebabkan sejumlah kesalahan lain yang berakibat pada pihak-pihak lain yang memakai informasi akuntansi tersebut. Seperti pernyataan Dearden yang dikutip pada awal tulisan ini, akuntansi adalah ibarat alat ukur, alat timbang. Mengukur atau menimbang dengan salah adalah perbuatan zalim. Karena berfungsi untuk tegaknya keadilan, maka akuntansi sebetulnya bukanlah sesuatu yang sepele, *it is a big deal, indeed!*

1). Penyebutan nama BMI secara terbuka, sama sekali tidak dimaksudkan untuk maksud negatif, melainkan sebaliknya. Penyebutan ini juga penulis anggap wajar, karena sifat BMI sebagai sebuah perusahaan yang terbuka dan sudah menjadi milik publik. Saham BMI walaupun tidak listed di pasar modal, namun dapat dimiliki oleh publik. Lebih dari itu, segala sesuatu yang dibicarakan dalam tulisan ini, tidak keluar dari data yang tertera dalam laporan Tahunan BMI. Tidak ada sesuatu yang menyangkut rahasia perusahaan yang dibicarakan. Tulisan ini ditulis insya Allah dengan landasan Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bissabri (QS 103 : 3)

2). Di Malaysia, pada dasarnya pihak otoritas penentu kebijakan akuntansi, yakni Malaysian Accounting Institute (MIA) dan Malaysian Association of Certified Public Accountants (MACPA) mengadopsi sepenuhnya International Accounting Standards (IAS). Hanya hal-hal yang tidak di atur oleh IAS dan atau ada hal-hal yang khusus menyangkut lingkungan Malaysia saja dibuatkan ketentuan atau standarnya. Kebijakan ini diambil karena alasan praktis, dari pada susah payah menyusun sendiri prinsip-prinsip atau standard akuntansi, jelas lebih hemat dengan mengadopsi begitu saja IAS (MIA, h. 1-2; Malaysian Accountant, 1986, h. 19)

Daftar Pustaka

- Adnan, M.A. (1991), *Prospek BPRS*, Makalah dipresentasikan di Shariah Banking Institute (SSBI), Yogyakarta.
- Al-Qur-an dan Terjemahannya, Departemen Agama R.I., Jakarta.
- Bank Islam Malaysia Berhad, 1993 *Annual Report*, Kuala Lumpur.
- Bank Muamalat, *Laporan Direksi 1992-1412 Hijriah*, Jakarta.
- Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 1993-1413 Hijriah*, Jakarta.
- Bank Muamalat Indonesia (1993), *Prospektus*, Jakarta.
- Dearden, J. (1988) *Management Accounting, Text and Cases*, Prentice-Hall International Editions, Englewood Cliffs, New Jersey.
- FASB (1984), *Statement of Financial Accounting Concepts No. 5*, Recognition and Measurement in Financial Statement of Business Enterprises, FASB, Connecticut.
- Gibson, C.H (1992), *Financial Statement Analysis Using Financial Accounting Information*, Fifth Edition, South-Western Publishing Co. Cincinnati, Ohio.
- Hamat, M, dan S.N.B.S. Ahmad (1991), *Applicability of Existing Accounting Standards for Islamic Banks*, in Islamika IV, Gateway Publishing House, Kuala Lumpur.
- Hammer, L.H., W.K. Carter and M.F. Usry (1994), *Cost Accounting*, 11th Edition, South-Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio.
- Hendriksen, E.S. and M.F.V. Breda (1992), *Accounting Theory*, Fifth Edition, Irwin, Homewood, Illinois.
- Ikatan Akuntan Indonesia (1994), *Prinsip Akuntansi Indonesia 1984*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kohler, E.L. (1975), *A Dictionary of Accountants*, Fifth Edition, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, N.J.
- Malaysian Accountant (1986) *Tehnickal Section*, Kuala Lumpur.
- Mansor, M.Hj. (1992), *Konsep Syariah dalam Bank Islam*, Bank Islam Malaysia Berhad, Kuala Lumpur.
- MIA, *Members Handbook "Accounting Standards"*, Kuala Lumpur.
- Paton, W.A. and A.C. Littleton (1940), *An Introduction to Corporate Accounting Standards*, Amerika Accounting Association.
- Sabiq, S. (1987), *Fikih Sunnah*, Vol.13, PT Al-Maarif, Bandung.
- Sprouse, R.T. and M. Moonitz (1962), *Accounting Research Study No.3, "A Tentative Set of Broad Accounting Principles for Business Enterprises,"* AAICPA, New York.